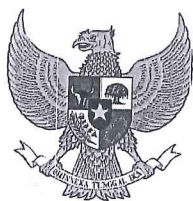


**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 14 TAHUN 2019

**TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

**KLASIFIKASI ARSIP
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrument dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);

4. Peraturan ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **14 TAHUN 2019**
TANGGAL **23 DESEMBER 2019**

- 2 -

4. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2014 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

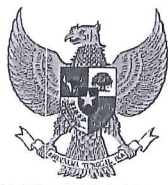
Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- a. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

b. Arsip ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **14 TAHUN 2019**
TANGGAL **23 DESEMBER 2019**

- 3 -

- b. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
- d. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

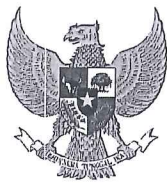
Pasal 2

- a. Klasifikasi Arsip di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dalam rangka pengelolaan arsip dinamis.
- b. Klasifikasi Arsip di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menggunakan kode klasifikasi arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- c. Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Klasifikasi Arsip di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4 ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **14 TAHUN 2019**
TANGGAL **23 DESEMBER 2019**

- 4 -

Pasal 4

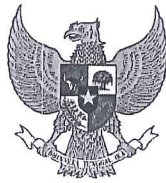
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA


AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN ARSIP LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR ISI

NO.	PERIHAL	KET.
1	2	3
01.	INTELEJEN PENGAMANAN.	
02.	OPERASI PENGAMANAN	
03.	PERSONIL TENAGA MANUSIA	
04.	MATERIIL/LOGISTIG	
05.	TERITORIAL	
06.	KOMONIKASI-ELEKTRONIKA	
07.	KEUANGAN	
08.	ORGANISASI-PROSEDUR	
09.	PERENCANAAN	
10.	INSPEKSI/PENGAWASAN	
11.	SISTEM	
12.	ADMINISTRASI UMUM	
13.	PENELITIAN-PENGEMBANGAN	
14.	PENDIDIKAN-LATIHAN	
15.	SURVIE-PENELITIAN	
16.	HUKUM	
17.	RESERSE	
18.	KAMTIBMAS	
19.	KESEHATAN	
20.	PEMBINAAN MENTAL	
21.	PEMBINAAN JASMANI	
22.	PENERANGAN	
23.	SEJARAH	
24.	LAPORAN	
25.	INDUSTRI	
26.	KEKARYAAN	
27.	HUBUNGAN INTERNASIONAL	
28.	PSYKOLOGI	
29.	NAVIGASI-AERONAUTIKA	
30.	DOKTRIN	
31.	SAMAPTA KEPOLISIAN	
32.	BIMBINGAN MASYARAKAT	



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

01. INTELEJEN/PENGAMANAN

01/08 Pengamanan Militer

- /01. Pengamanan Mabes TNI/Lemhannas RI
- /02. Pengamanan Personel di lingkungan Lemhannas RI

01/09 Pengamanan Politik

- /01. Balatkom-Peningkatan Padnas
- /02. Pokja Teror
- /03. Masalah Politik

01/14 Pengamanan Berita

- /01. Pengamanan Dokumen/Selebaran Gelap

01/20 Subversif

- /01. Perkara Subversif

01/23 Sabotase

- /01. Teroris

02. OPERASI MILITER

02/01 Pertahanan

- /01. Hankamneg

02/02. Keamanan Dalam Negeri

- /01. Siaga Mabes TNI

02/11 Operasi Gabungan

- /01. Operasi Bidang Lintas

02/13 Operasi Latihan

- /01. Latihan Angkatan Udara
- /02. Latihan TNI

03. PERSONEL-TENAGA MANUSIA

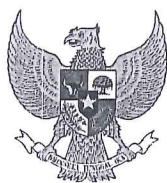
03/01 Pengadaan Personel TNI/Polri

- /01. Pengerahan WNI Menjadi Prajurit TNI

03/02 Pengangkatan Personel TNI/Polri

- /01. Pengangkatan Tenaga Ahli Pengajar/Pengkaji/Profesional
- /02. Miltif
- /03. Anggota Cad TNI/PDA/DDA

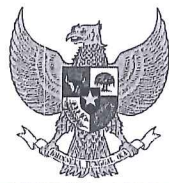
/04. Ikatan ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

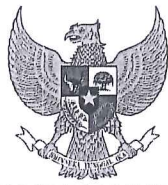
- /04. Ikatan Dinas Pendek/Lanjutan
 - /05. Sumpah-Janji TNI
 - /06. Penahanan Dalam Dinas Keprajuritan/PDK
 - 03/03 Penempatan Personel TNI/Polri
 - /01. Penempatan Jabatan TNI-AD
 - /02. Penempatan Jabatan TNI-AL
 - /03. Penempatan Jabatan TNI-AU
 - /04. Penempatan Jabatan Polri
 - /05. Penempatan Jabatan Gub/Wagub/Para Dir
 - /06. Berita Acara Sertijab
 - /07. Pemberhentian/Pengangkatan Jabatan di Luar Lemhannas RI
 - 03/04 Penugasan Personel TNI/Polri
 - /01. Penugasan Tenaga Ahli/Pokja diluar Lemhannas
 - /02. Ijin Tugas Dalam Negeri
 - /03. Ijin Tugas Luar Negeri
 - /04. Penugasan ke DPR/MPR
 - /05. Penugaskaryaan TNI
 - /06. Perbantuan anggota TNI/Polri/Sipil
 - /07. BKO Satpamwal/Anggota Jaga
 - 03/05 Penilaian Personel TNI/Polri
 - /01. Dapen/RH Anggota TNI
 - 03/06 Perubahan Status/Pangkat TNI/Polri
 - /01. Kepangkatan TNI-AD
 - /02. Milwa/Milsuk
 - /03. Kepangkatan TNI-AL
 - /04. Kepangkatan POLRI
 - /05. Kepangkatan TNI-AU
 - 03/07 Cuti Personel TNI/Polri
 - /01. Ijin Cuti/Kunjungan Keluarga ke Luar Negeri
 - 03/08 Nikah/Talak/Rujuk Personel TNI/Polri
 - /01. Kawin/Cerai/Rujuk anggota TNI
- 03/15 Pemberhentian ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- 03/15 Pemberhentian Personel TNI/Polri
/01. Rawatan Kedinasan Prajurit TNI dalam jabatan
- 03/16 Pensiun Personel TNI/Polri
/01. MPP/Pensiun TNI-AD
/02. Penerbitan tanggal lahir/Gelar Kesarjanaan
/03. MPP/Pensiun TNI-AL
/04. MPP/Pensiun TNI-AU
/05. MPP/Pensiun TNI-POLRI
- 03/17 Pengadaan Personel TNI/Polri
/01. Lamaran
/02. Tenaga Honor/Non PGPS
/03. Satpam/Satkam
- 03/18 Pengangkatan Personel Sipil
/01. CPNS
/02. Sumpah Janji PNS
/03. Pegawai Bulanan
/04. Penyusunan Formasi PNS
- 03/19 Penempatan Personel Sipil
/01. Penempatan/Pemindahan Jabatan PNS
- 03/21 Penilaian Personel Sipil
/01. DP3/RH dan Duk PNS Penilaian Personel
- 03/22 Perubahan Status/Gol Tingkat Personel Sipil
/01. Kepangkatan PNS
/02. Standarisasi Kompetensi Jabatan Struktural/Fungsional PNS
- 03/23 Cuti Personel Sipil
/01. Cuti PNS
- 03/24 Nikah/Talak/Rujuk Personel Sipil
/01. Nikah/Cerai/Rujuk PNS Anggota Lemhannas RI
- 03/31 Pemberhentian Personel Sipil
/01. Pemberhentian PNS
- 03/32 Pensiun Personel Sipil
/01. Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun
- 03/33 Penghargaan ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- 03/33 Penghargaan/Tanda Jasa
 - /01. Tanda Jasa/Penghargaan
- 03/34 Kesejahteraan Personel
 - /01. Gam. Kaporlap TNI/Korps
 - /02. KTA TNI-KTP PNS
 - /03. Gam Korpri/PNS
 - /04. Forage/Beras/ULP
 - /05. Koprime Lemhannas RI
 - /06. Koperasi
 - /07. Asuransi
- 03/35 Kesejahteraan Keluarga
 - /01. Kartu Istri/KPI/KPS
 - /02. Dharma Wanita/Perista
 - /03. Beasiswa pa/pi Anggota TNI/PNS/Teladan
 - /04. Hubungan/Pengaduan Keluarga Lemhannas RI
- 03/36 Veteran
 - /01. Veteran
- 03/40 Statistik Personel
 - /01. Statistik/Data Personel
- 03/43 Administrasi Personel
 - /01. SC/Litsus
 - /02. Tata Cara Mutasi Kepegawaian
 - /03. Perpu Kepegawaian/PNS
- 03/44 Pengendalian Karier
 - /01. Ujian Dinas
 - /02. Panitia/Dewan Karier
 - /03. Delegasi Wewenang
 - /04. Mutasi Kepegawaian
 - /05. Prosedur Pendidikan
- 03/45 Penyaluran Tenaga Kerja
 - /01. Penyaluran Tenaga Kerja Transmigrasi TNI / PNS

04. MATERIL ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- /51. Tamu Negara Polandia
- /52. Tamu Negara Swedia/Brusel
- /53. Tamu Negara Jepang
- /54. Tamu Negara Fiji
- /55. Tamu Negara Tanzania
- /56. Tamu Alzarbaijar

28. PSYKOLOGI

- 28/01 Konsultan
 - /01.
- 28/02 Pemeriksaan
 - /01.

29. NAVIGASI-ELEKTRONIKA

- 29/01 Lalu Lintas Angkutan Air/Udara dan Darat
 - /01. Daerah Larangan Berlayar
 - /02. Penunjukan Pelabuhan Bagian Pengangkutan Bahan Peledak

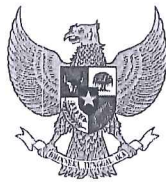
30. DOKTRIN

- 30/01 ABRI
 - /01. Catur Dharma Eka Karma

31. SAMAPTA KEPOLISIAN

- 31/01 Sabhara
 - /01.

32. BIMBINGAN ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

32. BIMBINGAN MASYARAKAT

32/01 Pembiinaan Keamanan Swakarsa

/01. G D N



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)